BAB II

MENJAGA KELANGSUNGAN SUMBER DAYA IKAN LAUT INDONESIA

II.1 Sumber Daya Laut Indonesia

Laut Indonesia memiliki sumberdaya yang begitu melimpah, sehingga menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih untuk pemanfaatan yang baik demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, berikut adalah profil laut Indonesia:

II.1.1 Laut Indonesia

Syamsul Maarif (seperti dikutip Haryani, 2009) wilayah kedaulatan Indonesia terbentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT terletak di posisi geografis sangat strategis, karena menjadi penghubung dua Samudera dan dua Benua, Samudera India dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia. Kepulauan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau besar dan pulau kecil dan memiliki garis pantai 81.000 km, serta luas laut terbesar di dunia yaitu 5,8 juta km2.

Wilayah laut Indonesia mencakup 12 mil laut ke arah luar garis pantai, selain itu Indonesia memiliki wilayah nasional yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dan landas kontinen sampai sejauh 350 mil dari garis pantai. Dengan ditetapkannya konvensi PBB tentang hukum laut Internasional 1982, wilayah laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan diperkirakan mencapai 7,9 juta km2 terdiri dari 1,8 juta km2 daratan, 3,2 juta km2 laut teritorial dan 2,9 juta km2 perairan ZEE. Wilayah perairan 6,1 juta km2 tersebut adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, dengan kata lain luas laut Indonesia adalah 3 kali luas daratannya. (Dahuri, 2009, h. 2)

II.1.2 Potensi Laut Indonesia

Indonesia dianugerahi potensi sumberdaya ikan yang sangat besar dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yaitu memiliki lebih kurang 3.000 jenis ikan diperairan laut dan tawar. Belum lagi posisi Indonesia berada di wilayah pusat segitiga terumbu karang dunia atau biasa disebut "*the Coral Triangle*" yang dikenal pula oleh masyarakat dunia sebagai wilayah "*the Amazone Sea*", memiliki berbagai jenis terumbu karang yang tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia, dengan luasannya diperkirakan 50.000 kilometer persegi, yaitu hampir 25% terumbu karang dunia, dengan spesies lebih dari 500 jenis, atau merupakan hampir 75% keanekaragaman jenis terumbu karang di dunia. Sehingga sangat pantas bila masyarakat dunia menempatkan Indonesia sebagai negara *Mega Biodiversity*. (Dahuri, 2009, h. 3)

II.2 Status Hasil Tangkapan Ikan Laut Indonesia

Untuk menentukan status hasil tangkapan dan pemanfaatan ikan laut di Indonesia dapat dilakukan dengan membandingan hasil tangkapan ikan dari waktu ke waktu di semua wilayah laut Indonesia, dari akumulasi perbandingan tersebut maka pengolahan data akan dapat disimpulkan apakah hasil tangkapan ikan laut Indonesia mengalami peningkatan ataupun sebaliknya, serta dari data tersebut juga dapat menentukan potensi jenis ikan yang masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan jenis ikan yang harus dijaga kelestariannya dengan tidak mengikutsertakan jenis ikan tersebut dalam daftar komoditas ikan tangkap yang dapat dimanfaatkan di sebuah wilayah tangkapan ikan laut.

Fakta yang digunakan untuk mengolah data hasil tangkapan ikan laut di Indonesia dapat menggunakan hasil kajian wilayah-wilayah yang menjadi lokasi penangkapan ikan serta data jenis ikan laut yang menjadi komoditas hasil tangkap di setiap wilayah-wilayah di Indonesia, selengkapnya dapat di jelaskan sebagai berikut (Mulyana, 2009, h. 8):

II.2.1 Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Ikan Indonesia

Terdapat 9 wilayah kegiatan penangkapan utama yang dapat dijadikan indikator untuk menentukan status keseluruhan dari potensi sumberdaya ikan di Indonesia, antara lain (Mulyana, 2009, h. 9):

1. Selat Malaka,
2. Laut Cina Selatan (Laut Natuna dan Selat Karimata),
3. Laut Jawa,
4. Selat Makassar dan Laut Flores,
5. Laut Banda,
6. Laut Arafura,
7. Laut Seram dan Teluk Tomini,
8. Samudera Pasifik dan Laut Sulawesi,
9. Samudera Hindia.

II.2.2 Jenis Ikan Tangkap di Indonesia

Dari berbagai jenis ikan tangkap yang terdapat di Indonesia, secara kategori hasil tangkapan dapat dikelompokkan menjadi 9 jenis, antara lain (Mulyana, 2009, h. 14):

1. Ikan Pelagis Besar,
2. Ikan Pelagis Kecil,
3. Ikan Demersal,
4. Udang dan Krustasea,
5. Ikan Karang Konsumsi,
6. Cumi-Cumi,
7. Ikan Hias,
8. Ikan Benih Alam Komersial,
9. Ikan Karang.

Waktu dan kawasan tangkapan ikan tersebut dapat dibedakan, sehingga memudahkan nelayan untuk memilih jenis ikan laut yang akan ditangkap. (Lampiran 1)

II.2.3 Akumulasi Penurunan Hasil Tangkapan Ikan Laut Indonesia

Dinas Perikanan dan Kelautan di setiap wilayah di Indonesia telah ditunjuk oleh Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mengakumulasi hasil tangkapan ikan laut di wilayahnya, dan melakukan perbandingan hasil tangkapan nelayan dari waktu ke waktu, termasuk menyimpulkannya dalam akumulasi perbandingan penurunan per 10 tahunnya, kesimpulan dari data tentang kajian hasil tangkapan ikan laut di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut (Mulyana, 2009, h. 21):

Wilayah Tangkapan Ikan	Grafik Persentase Penurunan Hasil Tangkap dari tahun 1999-2009								
	Ikan Pelagis Besar	Ikan Pelagis Kecil	Ikan Demersal	Udang dan Krustasea	Ikan Karang Konsumsi	Cumi-Cumi	Ikan Hias	Ikan Benih Komersil	Ikan Karang
Selat Malaka	48,4%	51,0%	33,2%	59,4%	47,8%	33,4%	78,2%	52,3%	32,3%
Laut Cina Selatan (L.Natuna dan S.Karimata)	17,3%	22,7%	19,6%	64,5%	12,0%	68,2%	43,7%	46,2%	43,6%
Laut Jawa	77,9%	69,6%	52,6%	71,7%	36,6%	63,5%	43,8%	44,2%	32,9%
Selat Makassar dan Laut Flores	12,6%	20,8%	51,6%	43,9%	28,0%	43,0%	10,2%	32,8%	52,6%
Laut Banda	23,6%	51,6%	67,7%	21,1%	16,8%	48,2%	22,3%	29,9%	33,5%
Laut Arafura	64,1%	16,3%	5,1%	58,1%	55,8%	14,0%	54,4%	56,0%	28,3%
Laut Seram dan Teluk Tomini	52,7%	24,2%	18,9%	19,1%	11,4%	17,7%	9,1%	32,3%	31,6%
Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik	54,8%	21,5%	69,3%	24,3%	18,7%	35,0%	34,0%	55,8%	56,8%
Samudera Hindia	22,8%	12,5%	22,6%	20,7%	47,9%	67,0%	43,6%	26,4%	48,0%

Keterangan : penurunan > 25% = *over exploited*.

Tabel II.1 Kesimpulan data kajian hasil tangkapan ikan laut Indonesia

Sumber : Mulyana (2009)

Dari tabel di atas dapat menggambarkan bahwa hasil tangkapan ikan di wilayah laut Indonesia mengalami penurunan setiap waktunya atau dalam status hasil eksploitasi yang buruk, dan hal ini memerlukan perhatian serius oleh pemerintah dengan mengkaji penyebab terjadinya hal tersebut.

II.3 Tindak Lanjut Permasalahan Sumber Daya Ikan Indonesia

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia untuk menanggapi permasalahan ekploitasi yang buruk pada pemanfaatan hasil ikan di laut Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

II.3.1 Kebijakan Impor Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hasil tangkapan ikan semakin tidak seimbang dengan hasil tangkapan ikan oleh nelayan dalam negeri yang cendrung berkurang dari waktu ke waktu. Jika dilihat dari situasinya, permasalahan ini menjadi keharusan untuk ditangani dengan segera.

Syamsul Maarif (seperti dikutip Arian, 2010) kebutuhan masyarakat dalam negeri adalah persoalan yang harus diprioritaskan dengan tindakan penyelesaian masalah dengan secepat mungkin, hal tersebut membuat pemerintah memilih untuk melakukan impor secepatnya dibandingkan harus membenahi persoalan nelayan dalam negeri, karena untuk membenahi persoalan nelayan Indonesia membutuhkan proses dan waktu yang lama. (h.22)

Arian menjelaskan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 menyatakan bahwa membuka kesempatan impor ikan bagi negara-negara penghasil ikan laut. Keputusan ini jelas merugikan nelayan, akan membuat nelayan kehilangan pasar komoditasnya terhadap kebutuhan masyarakat dalam negeri (Arian, 2010, h. 24).

II.3.2 Kebijakan Pemberdayaan Nalayan Dalam Negeri

Selain mengambil langkah untuk melakukan impor demi kebutuhan masyarakat dalam negeri, pemerintah juga melakukan upaya pemberdayaan kembali terhadap nelayan dengan cara melakukan kajian jenis komoditas ikan laut yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan di setiap wilayah pemanfaatan ikan laut di Indonesia, kajian ini dilaksanakan oleh Konservasi Sumber Daya Ikan Indonesia sebagai program yang

menentukan langkah-langkah dalam menjaga kelangsungan sumberdaya ikan di Indonesia.

Menurut KSDI (2009) kondisi pemanfaatan hasil tangkapan ikan di wilayah laut dibagi menjadi 3 kondisi, yaitu *under exploited* yaitu penangkapan ikan laut yang belum optimal secara jumlah pemanfaatannya, *fully exploited*, yaitu penangkapan ikan laut yang sudah optimal dan perlu untuk dipertahankan pemanfaatannya, dan *over exploited*, yaitu penangkapan ikan laut yang sudah berlebihan, sehingga berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan dan memburuknya keadaan ekosistem laut sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan. Dua kategori kondisi tersebut ditentukan melalui pengkajian keseimbangan antara pertumbuhan dan kelestarian ekosistem laut dengan jumlah hasil tangkapan dari waktu ke waktu. Berikut adalah hasil kajian tentang komoditas yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan oleh nelayan dalam negeri di wilayah laut Indonesia (Dahuri, 2009, h. 30):

1. Ikan Pelagis Besar masih berpotensi di Laut Cina Selatan, Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram dan Samudera Hindia.
2. Ikan Pelagis Kecil masih berpotensi di Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Flores, Laut Arafura, Laut Seram, Teluk Tomini, Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Samudera Hindia.
3. Ikan Demersal masih berpotensi di Laut Cina Selatan, Laut Seram, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.
4. Udang dan Peneid masih berpotensi di Laut Banda, Laut Seram, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.
5. Ikan Karang Konsumsi masih berpotensi di Laut Cina Selatan, Laut Banda, Laut Seram dan Samudera Pasifik.
6. Cumi-Cumi masih berpotensi di Laut Seram dan Laut Arafura.
7. Ikan Hias masih berpotensi di Laut Flores, Teluk Tomini dan Laut Banda.

Sumberdaya ikan benih alam dan ikan karang disetiap wilayah tangkapan di Indonesia sudah dalam status *under exploited,* sehingga

pemerintah memberi status dilindungi, serta melakukan impor bagi kedua jenis ikan tersebut.

Fadel Muhammad (seperti yang dikutip Arian, 2011) hasil kajian potensi komoditas tersebut selanjutnya harus di sosialisasikan kepada masyarakat nelayan dalam negeri, sehingga nelayan memahami jenis-jenis ikan yang tepat untuk dimanfaatkan, serta sebagai hasil tangkap yang bernilai jual bagi pemerintah sebagai pihak yang mendistribusikan hasil tangkapan para nelayan. Namun tidak sebatas itu, pemerintah juga memperketat kuota dan pajak impor bagi jenis-jenis ikan yang dinilai masih berpotensi besar untuk dihasilkan oleh nelayan dalam negeri tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2011. (h.25)

II.3.3 Kajian Penyebab Memburuknya Hasil Ikan Tangkap

Menurut KSDI (2009), penyebab utama yang berdampak kapada menurunnya hasil tangkapan nelayan adalah penggunaan alat tangkap ikan laut yang tidak ramah lingkungan, meskipun nelayan memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan ekosistem laut, namun ada beberapa faktor yang membuat nelayan mengesampingkan kelestarian ekosistem tersebut, antara lain:

1. Tingginya permintaan hasil tangkapan ikan oleh industri

   Sehubungan dengan keputusan impor oleh pemerintah, industri pengolahan ikan laut menjadi tempat menjual hasil tangkapan oleh nelayan, namun permintaan tehadap ikan tangkap oleh pihak industri swasta cendrung tidak dengan pertimbangan yang mengacu pada prinsip menjaga kelestarian lingkungan ekosistem laut. Harga beli hasil tangkapan yang tinggi membuat nelayan mengupayakan penangkapan ikan secara besar-besaran demi memenuhi permintaan tersebut.

   Seiring waktu ekosistem laut semakin memburuk yang secara langsung berdampak terhadap menurunnya jumlah tangkapan oleh nelayan. Kondisi tersebut membuat pihak swastapun kecewa, sehingga pihak swasta merubah keputusan

untuk ikut melakukan impor yang di fasilitasi oleh pemerintah. Hal inilah yang memperkuat fakta bahwa nelayan dalam negeri menjadi pihak yang sangat merugi. (Arian, 2010, h. 29)

2. Sosialisasi yang tidak berlangsung dengan baik

Sejak dibentuknya KSDI di era 1980-an telah sering dilakukan sosialisasi mengenai menjaga kelestarian ekosistem laut, namun dalam pelaksanaannya kerap menemui kendala, diantaranya adalah media sosialisasi yang dianggap tidak efektif, sebagai contoh, pihak yang melakukan sosialisasi selalu menggunakan media sosialisasi dalam bentuk papan pengumuman yang berisikan undang-undang dan ancaman terhadap tindakan perusakan ekosistem laut. Media papan pengumuman dianggap tidak efektif karena tidak dilakukan dengan pengawasan dan pendidikan yang menciptakan pemahaman dan pola pikir nelayan yang baik serta cara penyampaian yang tidak komunikatif. (Achmar, 2006, h. 28)

II.4 Alat Tangkap Ikan Laut Indonesia

Alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan alat tangkap yang ramah lingkungan, jenis alat tangkapan tersebut dijelaskan sebagai berikut (Arian, 2010, h. 34-38):

II.4.1 Alat Tangkap yang Tidak Ramah Lingkungan

Kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang sering digunakan oleh nelayan tradisional di dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan khususnya di dalam melakukan penangkapan ikan-ikan karang. Penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang kurang baik, baik bagi ikan-ikan yang akan ditangkap maupun untuk karang yang terdapat pada lokasi penangkapan. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek

samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian *biota* lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang.

Kegiatan yang marak dilakukan oleh nelayan adalah dengan menggunakan obat bius atau bahan beracun lainnya. Bahan beracun yang umum dipergunakan dalam penangkapan ikan dengan pembiusan seperti *sodium* atau *potassium sianida*. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, hal tersebut memicu nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan yang merusak dengan menggunakan racun *sianida*. Kegiatan ini umum dilakukan oleh nelayan untuk memperoleh ikan hidup.

Hasil yang diperoleh dengan cara ini memang merupakan ikan yang masih hidup, tetapi penggunaannya pada daerah karang memberikan dampak yang sangat besar bagi terumbu karang. Selain itu penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang tertentu. Racun tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi mabuk dan mati. Disamping mematikan ikan-ikan yang ada, sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, yang ditandai dengan perubahan warna karang yang berwarna warni menjadi putih yang lama kelamaan karang menjadi mati.

Kegiatan lain yang termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah karang. Kegiatan ini merupakan kegiatan penangkapan yang bersifat merusak dan tidak ramah lingkungan. Penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah karang dapat dilihat pada kasus yang terjadi di perairan Bagan Siapi-Api, Provinsi Sumatera Utara dan di Selat Tiworo, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, penggunaan alat tangkap ini sudah dilarang penggunaannya di Indonesia karena alat tangkap tersebut termasuk kedalam alat tangkap yang sangat tidak ramah lingkungan karena memiliki selektifitas alat tangkap yang sangat buruk. Nelayan di Sulawesi Utara cenderung tidak mempedulikan hukum yang ada. Mereka

tetap melakukan proses penangkapan dengan menggunakan alat tangkap *trawl*. Alat yang umumnya digunakan oleh nelayan berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar, memiliki lubang jaring yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan berukuran kecil sampai dengan ikan yang berukuran besar dapat tertangkap dengan menggunakan jaring tersebut. Cara kerjanya, alat tangkap ditarik oleh kapal yang mana menyapu ke dasar perairan. Akibat penggunaan pukat harimau (*trawl*) secara terus menerus menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis sumberdaya perikanan. Hal ini dikarenakan ikan-ikan kecil yang belum memijah tertangkap oleh alat ini sehingga tidak memiliki kesempatan untuk memijah dan memperbanyak *spesies*-nya. Selain hal tersebut, dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan alat tangkap ini pada daerah karang adalah rusaknya terumbu karang akibat tersangkut ataupun terbawa jaring.

11.4.2 Alat Tangkap yang Ramah Lingkungan

Alat penangkapan ikan ramah lingkungan yang digunakan di laut Indonesia sangat beragam, setidaknya ada 17 kategori alat penangkapan ikan laut yang ramah lingkungan di Indonesia, antara lain, Mini Trawl, Payang, Jaring Insang Hanyut (*Drift Gill Nets*), Jaring Insang Lingkar (*Encircling Gill Nets*), Jaring Insang Tetap (*Set Gill Nets*), Jaring Udang (*Trammel Net*), Serok dan Sondong (*Scoop Nets*), Rawe (*Drift Longline Other Tuna Long Lines*), Pancing (*Hook and Lines*), Sero (*Guiding Barriers*), Bubu, Jermal dan Tangguk (*Stow Nets*), *Fyke Net*, Belat, Pengumpul Kerang, Jala dan Tombak. (Arian, 2010, h. 46)

Alat penangkapan ikan yang efektif untuk digunakan di laut Indonesia adalah, *Fyke Net* karena selain ramah lingkungan *Fyke Net* juga dapat menangkap ikan dengan jumlah yang optimal, hemat tenaga dan mudah untuk dibuat serta dioperasikan serta sesuai dengan kondisi laut dan nelayan Indonesia. (O'Neal, 2006, h. 120)

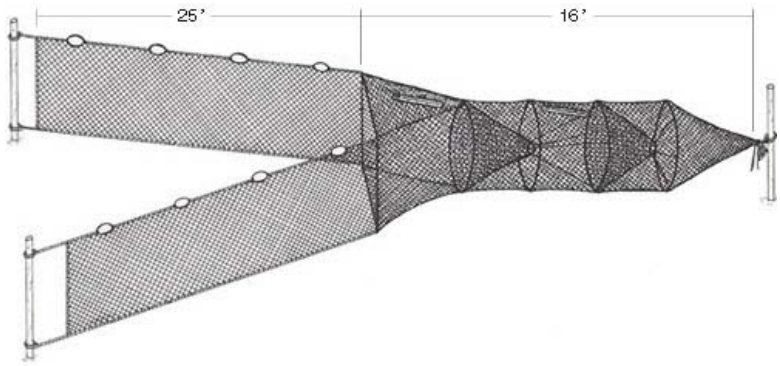
Berikut adalah keterangan tentang *Fyke Net*:

- Pengertian *Fyke Net*

O'Neal mendefinisikan bahwa *Fyke Net* adalah sejenis perangkap ikan yang banyak dioperasikan oleh para nelayan di seluruh dunia. *Fyke Net* berasal dari Finlandia dan telah dioperasikan di laut untuk menangkap *herring, whitefish* dan *salmon*. Alat ini merupakan modifikasi dari alat "*salmon wing net*" yang telah digunakan beratus tahun yang lalu. *Fyke Net* adalah alat penangkap ikan yang banyak dioperasikan di perairan dangkal hingga sedang. Dalam kondisi demikian alat ini biasa dioperasikan tanpa menggunakan sayap atau penaju.(O'Neal, 2006, h. 122)

- Konstruksi *Fyke Net*

O'Neal menjelaskan konstruksi dari *Fyke Net* umumnya terdiri dari dua buah sayap dan satu kantong di mana bagian sayap tersebut adalah bagian yang dipasangkan pada 2 kapal, sebagian besar dari jenis set net ini bentuknya hampir menyerupai bentuk jaring pukat harimau/*trawl* (O'Neal, 2006: 123).



Gambar II.1 Konstruksi alat tangkap ikan *Fyke Net*

Sumber: http://www.fipec.qc.ca/ahtml/averveux.html (27 Oktober 2012)

Bahan utama yang digunakan untuk membuat *Fyke Net* terdiri dari tali nylon untuk jaring, tali tambang sebagai pembangun badan jaring, dan kawat besi untuk membentuk pintu jebak untuk menjaring ikan (Lampiran 2).

- Cara Penggunaan *Fyke Net*

Pada dasarnya alat tangkap ikan *Fyke Net* dirancang untuk tidak bisa digunakan untuk menjangkau terumbu karang di kedalaman laut, sehingga tidak merusak ekosistem terumbu karang, selain itu *Fyke Net* dapat digunakan diperairan sungai dan laut, hanya saja dalam penggunaannya, ukurannya berbeda, untuk penggunaan dalam penangkapan ikan laut, ukuran *Fyke Net* tentu lebih besar dan disesuaikan dengan ukuran kapal nelayan yang digunakan.

Dua sayap *Fyke Net* ditarik oleh dua kapal, serta dijalankan mengelilingi wilayah yang dinilai banyak memiliki hasil tangkapan ikan. Secara teknis ikan yang telah terjebak kedalam kantung jaring tidak dapat lepas lagi, karena arus air yang seiring dengan arah pergerakan kapal yang begitu cepat sangat tidak memungkinkan ikan untuk keluar, dan ujung dari jaring tersebut dibuat lebih kecil.

Yang perlu di perhatikan untuk membuat alat tangkap *Fyke Net* adalah ukuran lingkar jala yang tidak begitu kecil, agar ikan yang berukuran kecil tidak ikut tertangkap, sesuai dengan prinsip pemanfaatan hasil laut yang ramah lingkungan, ikan yang muda/kecil berada pada masa produktif dan sedapatnya tidak untuk ditangkap. (O'Neal, 2006, h. 126)

II.5 Solusi Permasalahan Sumber Daya Ikan Laut Indonesia

Sesuai pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelangsungan pemanfaatan sumberdaya ikan laut Indonesia yang semakin memburuk salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat penangkapan ikan laut yang tidak ramah lingkungan, seiring dengan telah dilakukannya kajian tentang alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, hal tersebut sangat perlu untuk disosialisasikan kepada nelayan di Indonesia, hendaknya sosialisasi tersebut tidak lagi menggunakan media yang tidak komunikatif seperti papan pengumuman yang berisi undang-undang dan ancaman hukuman serta tanpa pengawasan, tetapi dengan melakukan kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan dianggap lebih efektif karena pihak yang mensosialisasikan dapat secara tatap muka untuk memaparkan manfaat dan tujuan dari materi yang

ingin disampaikan oleh penyelenggara kegiatan penyuluhan, selain itu dapat mengajak dengan memberikan bekal pendidikan non-formal yang mudah dipahami, serta menjadi media tanya jawab secara langsung bagi objek penyuluhan untuk memperkaya wawasannya. (Suharyanto, 2008, h. 1)

II.5.1 Pengertian Penyuluhan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar penggiat pertanian, perikanan dan kehutanan mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan diri mereka dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan. (Suharyanto, 2008, h. 2)

II.5.2 Konsep Kegiatan Penyuluhan

Konsep-konsep penting terkait penyuluhan adalah proses pendidikan non-formal kepada orang-orang dewasa untuk proses perubahan menuju perilaku yang baik sesuai dengan yang diinginkan dalam kelangsungan kegiatan penyuluhan itu sendiri, serta berdasarkan proses pemberdayaan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan baru. (Suharyanto, 2008, h. 4).

II.5.3 Sifat Kegiatan Penyuluhan

Menurut Suharyanto (2008) penyuluhan memiliki 2 sifat utama dalam kelangsungannya, yaitu:

1. Sebagai Penerangan

Pemberitahuan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dimana pihak yang diberi penerangan bersikap memperhatikan.

2. Sebagai Propaganda

Usaha menumbuhkan rasa dan sikap target penyuluhan terhadap suatu benda atau masalah, sehingga timbul perasaan tertarik. (h.4)

II.5.4 Fungsi Kegiatan Penyuluhan

Menurut Suharyanto (2008) fungsi kegiatan penyuluhan ada 7 poin penting, antara lain:

- Meningkatkan pengetahuan,
- Meningkatkan kemampuan,
- Meningkatkan sikap hidup,
- Meningkatkan pemahaman,
- Meningkatkan standar capaian,
- Meningkatkan rasa ingin bekerja,
- Meningkatkan kepercayaan diri. (h.4)

II.5.5 Peranan Kegiatan Penyuluhan

Menurut Suharyanto (2008) kegiatan penyuluhan terdiri dari 3 peranan, antara lain:

- Penyuluhan pertanian memiliki peran penting, yaitu sebagai kegiatan yang merupakan pendamping, perantara, dan penemu solusi bagi pembangunan pertanian.
- Keberhasilan penyuluhan pertanian ditentukan pula oleh profesionalitas penyuluh, yang memiliki tugas utama sebagai pembimbing, motivator, komunikator, dan lain lain.
- Untuk menghasilkan sumberdaya manusia nelayan yang peka terhadap tekhnologi, transparansi serta menjadi masyarakat yang madani. (h.5)

II.6 *Target Audience*

Sasaran dalam penyampaian pesan dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan adalah kepada penggiat pemanfaat hasil laut secara langsung, yaitu nelayan, dari sisi alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan melaut, kategori

nelayan sebagai *target audience* dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kategori kapal berukuran besar, berukuran sedang dan berukuran kecil. Dan jika dilihat dari sisi status profesi aktifitas nelayan, dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu nelayan yang bekerja secara perorangan dan nelayan yang bekerja dibawah sebuah badan usaha yang bergerak dalam pemanfaatan hasil laut.

Kategori nelayan yang dianggap perlu diutamakan dalam kegiatan penyuluhan adalah nelayan yang menggunakan kapal kecil dan yang berstatus sebagai nelayan yang bekerja secara perorangan, karena secara pengawasan oleh pemerintah, nelayan yang menggunakan kapal kecil dan bekerja secara perorangan adalah yang secara umum jauh dari pengawasan pemerintah, karena tidak memiliki perizinan resmi dari pemerintah sebagaimana yang diterapkan pada kategori lainnya serta jumlah nelayan dalam kategori ini sangat banyak secara kuantitas, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh nelayan pada kategori ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan sumberdaya ikan laut di Indonesia. Meskipun demikian, kategori nelayan yang menggunakan kapal berukuran sedang dan besar juga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan sumberdaya ikan laut Indonesia, namun masih memiliki kemungkinan besar untuk dapat ditindaklanjuti dengan pengawasan dan penindakan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku ketika ditemukan tindakan pelanggaran yang berdampak buruk terhadap kelangsungan sumberdaya ikan laut di Indonesia.

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan bersifat nasional dan tidak terbatas untuk salah satu atau beberapa wilayah karena beberapa alasan, antara lain karena persoalan kelangsungan sumberdaya ikan ini merupakan permasalahan secara menyeluruh di semua wilayah pemanfaatan hasil ikan laut di Indonesia, selain itu pendekatan komunikasi memang akan lebih efektif jika dilakukan dengan penyesuaian terhadap budaya pengkomunikasian yang berbeda-beda disetiap wilayah di Indonesia, namun menurut analisa dan penelitian yang telah dilakukan, nelayan yang melakukan penangkapan ikan disebuah daerah tidak hanya terdiri dari komunitas atau masyarakat di wilayah pemanfaatan hasil laut itu saja, namun sebagian besarnya juga berasal dari masyarakat dari luar daerah yang ikut memanfaatkan hasil laut di daerah tersebut, sehingga jika pengkomunikasian pesan dilakukan dengan pendekatan yang berdasarkan budaya di wilayah tertentu,

maka akan memperbesar kemungkinan tidak tersampaikannya pesan penyuluhan kepada masyarakat yang berasal dari wilayah lain yang bekerja di wilayah tersebut. Sebagai bukti, pada saat ini banyak berkembang pemikiran dari masyarakat asli dari suatu wilayah bahwa masyarakat lokal selalu menjaga kelestarian ekosistem laut, namun kerusakan yang telah terjadi disebabkan oleh tindakan nelayan yang berasal dari wilayah lain, sebagaimana terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti perairan Lombok, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Kepulauan Riau dan lain-lain. Realita pola pikir yang terjadi tersebut, hendaknya tidak berkembang menjadi pemicu konflik antar sesama nelayan yang akan menjadi ancaman terhadap kelangsungan kehidupan bersosial.